

**R**  
**RENCANA KERJA**  
**TAHUN**

**2018**

DIREKTORAT  
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN  
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGECAHAN DAMPAK LINGKUNGAN  
KEWILAYAHAN WILAYAH DAN SEKTOR**

PERATURAN DIREKTUR PENGECAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEWILAYAHAN WILAYAH  
DAN SEKTOR DIREKTORAT PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN

NOMOR : P. 02/PDLKWS/TU/KEU.0/12/2017

TENTANG

RENCANA KERJA  
DIREKTORAT PENGECAHAN DAMPAK LINGKUNGAN  
KEWILAYAHAN WILAYAH DAN SEKTOR  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
TAHUN 2018

DIREKTUR PENGECAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEWILAYAHAN WILAYAH DAN  
SEKTOR,

- Menghimbau :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDT/KEU.0/11/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kewilayah dan Sektor Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu meratifikasi Peraturan Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Kewilayah dan Sektor tentang Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kewilayah dan Sektor Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-1/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-1/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-segery/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEM/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEM/KUM.1/10/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);
11. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDT/KEU.0/11/2017 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017.

13. Peraturan...

13. Peraturan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kelijakan Wilayah dan Sektor Nomor P.1/PDLKWS/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kelijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015-2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIDAKNAN WILAYAH DAN SEKTOR TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIDAKNAN WILAYAH DAN SEKTOR TAHUN 2018.

**Pasal 1**

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kelijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kelijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana operasional kegiatan dan anggaran Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kelijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 04 Desember 2017

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN  
KEBIDAKNAN WILAYAH DAN SEKTOR  
  
I. Laksan Wirayanti M.C.P.  
NIP. 19690205 199403 2 001

Lampiran  
Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor  
Nomor : P.2/PDLKWS/TU/KEU.0/12/2017  
Tanggal : 04 Desember 2017

**Tentang**

**RENCANA KERJA  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN  
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

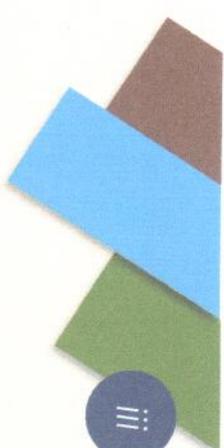
PERATURAN DIREKTUR .....	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	i
PENGANTAR DIREKTUR .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi dan SDM .....	3
<b>II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017</b>	
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017 .....	5
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017 .....	12
<b>III. RENCANA KERJA TAHUN 2018</b>	
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional .....	14
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan Tahun 2018 .....	19
<b>IV. PENUTUP</b>	
<b>V. LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Hal
Tabel 1	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PDLKWS	1
Tabel 2	Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat PDLKWS Berdasarkan Jabatan Fungsional Sampai Tahun 2017	4
Tabel 3	Status Reviu KLHS Tahun 2016	5
Tabel 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2016	8
Tabel 5	Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2017	10
Tabel 6	Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016	12
Tabel 7	Perkiraan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2017	13
Tabel 8	Indikator dan Target Kegiatan Pencegahan dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018	15
Tabel 9	Sasaran Kegiatan dan Indikator Pendukung Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018	16
Tabel 10	Struktur Kegiatan Tahun 2018	17

**DAFTAR GAMBAR**

Nomor	Uraian	Hal
Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3
Gambar 2	Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat PDLKWS Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	4



## PENGANTAR DIREKTUR

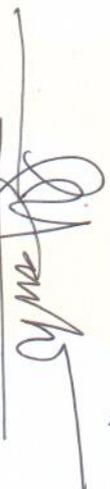
Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Palanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 serta merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 – 2019.

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 merupakan acuan yang memuat gambaran program, kegiatan dan anggaran Direktorat selama satu tahun pada seluruh unit eselon III lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018.

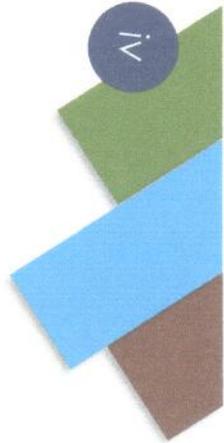
Akhir kata, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan pada tingkat wilayah maupun sektor yang sudah direncanakan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2018 dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan  
Kebijakan Wilayah dan Sektor



**Ir. Laksmi Wijayanti, MCP**  
NIP. 1969920611995032001



# 01 PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, program dan kegiatan planologi kehutanan dan tata lingkungan berperan dalam pencapaian pembangunan nasional terutama dalam prioritas nasional pembangunan wilayah khususnya program prioritas pembangunan perdesaan dan reforma agraria yang merupakan salah satu agenda prioritas nawa cita.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam upaya tercapainya pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas **"melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor"**.

Sebagai salah satu unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki peran penting dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup nasional khususnya dalam bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Untuk menjalankan peran tersebut, maka dalam Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 – 2019, dirumuskan arah kebijakan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam 5 tahun kedepan serta strategi pencapaiannya dijabarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PDLKWS



Guna mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai program planologi kehutanan dan tata lingkungan, maka sasaran dan indikator yang harus dicapai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor untuk menjaga daya dukung dan daya tampung dengan indikator seluruh pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor terlaksana.

Tujuan penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018.
2. Memberikan gambaran dari seluruh kegiatan lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan mempunyai kedudukan serta peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan.

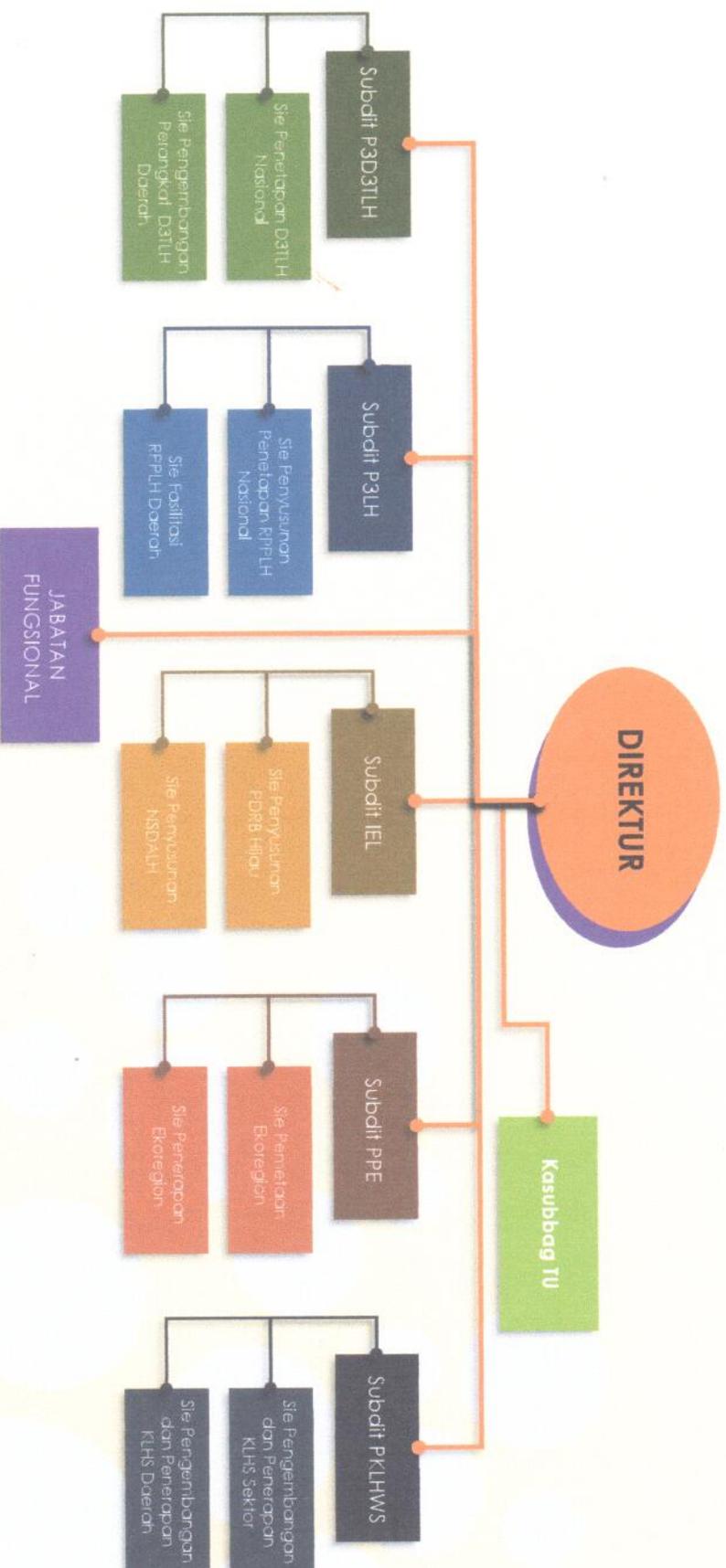
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
5. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

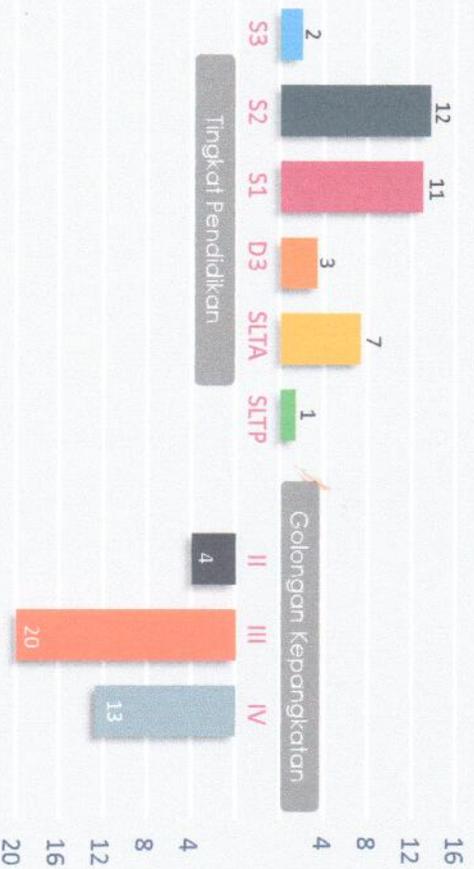
### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2017 berdasarkan golongan adalah 37 orang. Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jabatan fungsional lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Gambar 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat PDLKWS Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Tabel 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat PDLKWS Berdasarkan Jabatan Fungsional sampai Tahun 2017

Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)	Σ(Jumlah)
Tertentu		
Pengendali Ekosistem Hutan		
Pelaksana Lanjutan	1	3
Pelaksana	2	
Perencana		
Pertama	3	
Calon perencana	1	4
Pertama		
Surveyor Pemetaan	1	1

Meskipun secara struktural berada langsung dibawah Direktur, dalam pelaksanaan tugas harian para pejabat fungsional tersebut ditempatkan dibawah Sub Direktorat dengan pembinaan oleh masing-masing Kepala Sub Direktorat. Hal tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya tenaga staf non struktural sehingga selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai pejabat fungsional juga ditugaskan untuk membantu urusan teknis maupun non teknis kegiatan Subdi-Subdi terkait.

Dalam penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Tahun 2018, capaian-capaian pada tahun tahun sebelumnya sangat penting untuk diperhatikan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.



### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016

Capaian pelaksanaan unit kegiatan tahun 2016 dan 2017 merupakan kondisi konkrit yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan unit kegiatan tahun 2018, untuk kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran unit kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### A. Sasaran Pertama : **Telaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas**

Pada tahun 2016, sasaran implementasi kewajiban KLHS bagi perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disunnnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup : penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman; bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan; serta bantuan keahlian apabila dipandang perlu. Salah satu kegiatan tersebut adalah pendampingan pada KLHS untuk Masterplan Program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD).

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri LHK No. SE-04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang menggarisbawahi kewajiban KLHK untuk melakukan reviu kelayakan KLHS yang disusun sektor dan daerah, Direktorat PDLKWS juga melakukan reviu atas beberapa KLHS sebagaimana tabel berikut.

Salah satu milestone perwujudan pencapaian Sasaran Pertama tahun 2016 adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

#### Status KLHS :

- Ditalah pada saat asistensi teknis ke Di PDLKWS
- Sudah realisasi evaluasi bersama stakeholder
- Secara resmi menyampaikan ke Di PDLKWS dan di review bersama

Tabel 3. Status Reviu KLHS Tahun 2016

No	Dokumen KLHS
1	RPJMD Kab Nagekeo
2	RTRW Taponduli Utara
3	RTRW Prov. Banten
4	RTRW Kab Belu
5	RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota
6	RTR Agriindustri Gresik-Lamongan
7	RTR Segitiga Emas Lamongan-Tuban-Bojonegoro
8	RTRW Buton Utara
9	RPJMD Kabupaten Kuningan
10	RDIR Kota Nagekeo
11	RPJMD Kota Tidore
12	RTRW Taponduli Utara
13	RTRW Prov. Banten
14	RTR Agropoltan Regional Bromo-Tengger-Semeru
15	RTRW Kota Aceh
16	RPJMD Kab. Bone Bolango

## B. Sasaran Kedua : **Tersusunnya RPP LH Nasional dan RPP LH Daerah untuk menjadi acuan dalam RP JMN/RPJMD**

Untuk mewujudkan Sasaran Kedua, Direktorat PDLKWS melaksanakan serangkaian kegiatan yang saling terkait, dimana secara teknis output kegiatan yang satu akan menjadi input bagi kegiatan yang lain. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

1. Penyempurnaan dan Pengembangan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000
2. Penyusunan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion
3. Penyusunan /Penyempurnaan RPP LH Nasional
4. Fasilitasi Penyusunan RPP LH Provinsi dan penyusunan RPP LH Kabupaten/Kota

Penetapan ekoregion menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya dalam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Pada intinya, kegiatan ini adalah memetakan ekoregion Indonesia sesuai dengan yang dimandatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2016, dilaksanakannya kegiatan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000 di 2 Provinsi di Pulau Sulawesi (Sulut, Gorontalo), serta 2 Provinsi di Pulau Jawa (Jateng, Jatim) dengan output berupa 9 satuan peta ekoregion skala 1 : 250.000 Provinsi Sulut dan Gorontalo.

Selain itu juga dilakukan beberapa kegiatan yang menghasilkan beberapa output pendukung berupa : Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Peta Ekoregion skala 1 : 250.000, Draft

NSPK Penyusunan Peta Ekoregion skala 1 : 250.000 dan Laporan hasil verifikasi di Provinsi.

Dalam kegiatan Penyusunan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, sudah tersedia Draft Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup Nasional Untuk Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa.

Selain penetapan indikasi daya dukung nasional, juga dilakukan penyiapan bahan NSPK daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana berikut:

1. Rapermen LHK Pedoman Penyusunan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Layanan Ekosistem
2. Rapermen LHK tentang Tata Cara Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
3. Draft Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup Nasional Untuk Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa

Selanjutnya, dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP LH) telah dihasilkan Draft Dokumen RPP LH Nasional yang telah dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. RPP LH Nasional disepakati akan berlaku selama 30 tahun dengan fokus pada isu strategis **Keberlangsungan jasa pengatur air dan penyimpan air dan Ketahanan pangan nasional.**

Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun RPP LH, sebagaimana amanat UU 32 Tahun 2009, dilakukan bimbingan teknis terhadap beberapa pemerintah daerah prioritas berdasarkan target dalam RPJMN, yaitu 7 (tujuh) Provinsi di Ekoregion Sumatera dan 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di Ekoregion Jawa. Selain hal tersebut, dilaksanakan juga penyusunan NSPK sebagai acuan penyusunan RPP LH di daerah yang salah satu keberhasilannya adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran MenLHK nomor 5 tahun 2016 tentang penyusunan RPP LH Daerah

C. Sasaran Ketiga : **Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau**

Output utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau. Pada tahun 2016, telah dilakukan fasilitasi penyusunan PDRB Hijau Kota Bogor dan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

“ Penyusunan PDRB Hijau Kota Bogor dapat digunakan sebagai dasar yang lebih akurat bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan Kota Bogor. Adanya PDRB Hijau akan menjadi *satelit account* bagi pemerintah Kota Bogor dalam membangun daerahnya. Penyusunan PDRB Hijau didasarkan kepada PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha Tahun 2010-2014, dengan melakukan inventarisasi terhadap data yang berkaitan dengan depleksi sumber daya alam dan kerusakan dan pencemaran lingkungan.”



“ Untuk penyusunan NSDA LH, dilakukan uji coba penghitungan layanan jasa ekosistem berupa jasa provisioning/penyediaan komoditas padi dan kayu, jasa pengaturan permukiman air bersih, jasa keanekaragaman hayati Owa Jawa dan jasa pariwisata di Gunung Gede Pangrango. Penghitungan ini selanjutnya akan dicoba pengintegrasianya dalam penyusunan Neraca SDA LH. “

Selain hal tersebut, penyusunan RPP Intrumen Ekonomi Lingkungan yang mengatur setidaknya instrumen ekonomi lingkungan hidup juga terus dilakukan. Pengaturan RPP Instrumen Ekonomi LH mencakup 3 (tiga) kelompok yakni (1) Perencanaan Ekonomi Lingkungan (2) Pendanaan Lingkungan Hidup (3) Insentif dan/ atau Disinsentif. Sedangkan jenis instrument yang akan diatur meliputi: Neraca SDA LH, PDB/ PDRB Hijau, Kompensasi/ Imbal Jasa LH antar daerah, Interndisiasi LH, Dana Jaminan Pemulihan LH, Dana Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan dan Pemulihan LH, Dana Amanah/ bantuan untuk konservasi, Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup, Penerapan Pajak, retribusi dan Subsidi LH, Pengembangan Sistem Lembaga Keuangan dan Pasar Modal yang Ramah LH, Pengembangan Sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/ atau Emission, Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup, Pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup, Pengembangan Sistem Label Ramah LH, dan Sistem Penghargaan Kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH.

Tabel 4. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (Unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	Realisasi Tahun 2016						
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJ, RJMN dan KR P Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun Jumlah KLHS yang terreview keloyakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Terjaminnya Kualitas KLHS berbasis DDDT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	Koordnansi Nasional KLHS	1 Kegiatan						
							Jumlah KLHS yang terreview keloyakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Review keloyakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Terreviewnya keloyakan Dokumen KLHS	Jumlah KLHS yang terreview keloyakannya	Validasi keloyakan KLHS Sektor	16 KLHS
							Jumlah RPPH Nasional yang tersusun (1 RPPH Nasional), Jumlah Review RPPH Nasional (1 Dokumen Midterm Revlu RPPH Nasional), 1 Dokumen revlu 5 Tahunan)	Penyusunan/Perempunaan/Review RPPH Nasional	Tersusunnya/terreviewnya Dokumen RPPH Nasional	Hasil Penyempunaan Dokumen RPPH Nasional	Penyusunan NSPK RPPH Nasional Penyusunan NSPK RPPH Nasional Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	1 Dokumen RPPH Nasional 1 Draft RPP RPPH Nasional
							Jumlah RPPH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPH Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPH Provinsi	RPPH Provinsi yang tersusun sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	Penyusunan NSPK RPPH Provinsi Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPH Provinsi	7 RPPH Provinsi
							Jumlah RPPH Kab/kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPH Kab/kota	Terselenggaranya Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPH Kabupaten/kota	RPPH Kab/kota yang tersusun sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	Penyusunan NSPK RPPH Kab/kota Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPH Kab/kota	10 RPPH Kab/kota
							Jumlah penelaapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penelaapan dan update (pembaruuan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Tersusunnya Indeks daya dukung dan daya tampung LH Nasional	Jumlah penelaapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan indikasi DDDT lingkungan hidup nasional Pengembangan NSPK dan metode DDDT Lingkungan Hidup Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis DDDTLH daerah	1 penelaapan indikasi DD DT Nasional
							Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/penyempunaan peta ekoregion pada skala 1 : 250000	Tersedianya peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Pemetaan Ekoregion Sosialisasi dan Asistensi Penerapan Ekoregion	9 Satuan Peta Sulawesi
							Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan neraca SDA LH, validasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Tersusunnya Neraca SDA LH, Validasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA LH Tematik	1 Dokumen NSDA LH Jawa Barat
							Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan neraca SDA LH, validasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Tersusunnya Neraca SDA LH, Validasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Fasilitasi Penyusunan PDR/PDRB yang disesuaikan	1 Dokumen PDRB Hijau Kab. Bogor

Terusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup )

## 2. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam periode pembangunan lima tahun (2015-2019), hal ini bermakna bahwa tahun 2017 merupakan kelanjutan dalam melewatkan kondisi pengungkit akselerasi pencapaian target pembangunan dua tahun berikutnya, yaitu percepatan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya. Pada Tahun ini, terdapat penambahan Sasaran Kegiatan yang berasal dari Prioritas Nasional terkait Kemittiman, yaitu Penjaminan Kualitas KLHS Tata Ruang laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Puau-pulau Kecil (RZWPK).

Perkembangan pencapaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2017 dimonitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan. Sampai dengan Bulan November 2017, Capaian Indikator Kinerja 2017 sudah mencapai 90% lebih dengan menyelesaikan kegiatan yang sifatnya finalisasi dokumen.

Kegiatan penyusunan, pembahasan, dan finalisasi NSPK masih merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan mengingat nilai pentingnya sebagai bagian dari prakondisi pelaksanaan kegiatan Direktorat.

Disamping itu, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah berjalan seperti pembinaan teknis (KLHS, RPPLH, DDDTLH, dan Ekoregion) ke Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kegiatan validasi KLHS tetap dilakukan dengan beberapa inovasi, seperti diadakannya Klinik untuk pelayanan konsultasi Pemerintah Daerah yang cukup efektif dan efisien.

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional mengalami kemajuan yang signifikan. Beberapa perbaikan dan penyempurnaan muatan Dokumen RPPLH juga terus dilakukan.

Selain itu, pada tahun 2017 ini, Direktorat PDLKWS mendapat penguasan untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyelesaian permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan Pegunungan Karst Kendeng yang sempat mengemuka dan menjadi headline sehingga menjadi permasalahan yang cukup serius untuk segera dicari jalan keluarnya.

Capaian yang sangat penting dan menjadi faktor yang sangat menentukan kinerja Direktorat ke depan dan akan sangat berperan penting dalam perkembangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya adalah segera ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Permen LHK tentang KLHS, Peta Ekoregion Nasional, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional.

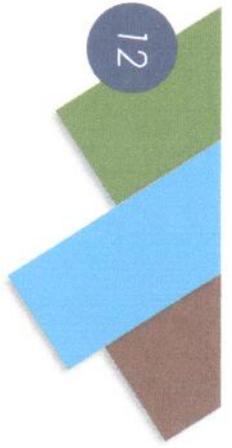
Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE) tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2017 seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Kegiatan Kunci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	TARGET 2017	Perkiraan Realisasi (%)
Tetapkannya analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonsasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonsasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	Pengenadlian dan Penjaminan Kualitas KLHS rencana tata ruang laut nasional	Terjaminnya kelayakan dan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional	KLHS Rencana Zonsasi Wilayah Pesisir yang terjamin kelayakan dan kualitasnya	Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KLHS RTRLN Validasi kelayakan KLHS RTRLN	1 KLHS RTRLN	0%
Tetapkannya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJ, RJKM dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Terjaminnya kualitas KLHS berbasis DDDT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	Koordinasi Nasional KLHS Validasi kelayakan KLHS Sektor	1 Kegiatan	100%
Tersusunnya RPPH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (terutama pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPH Nasional yang tersusun (1 RPPH Nasional), Jumlah Review RPPH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPPH Nasional)	Penyusunan/ Penyempurnaan /Review RPPH Nasional	Tersusunnya/ Terviewnya Dokumen RPPH Nasional	Hasil Review Dokumen RPPH Nasional	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPH Provinsi	5 RPPH Provinsi	100%

Tabel 5. Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Kegiatan Kunci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	target 2017	Perkiraan Realisasi (%)
<p>Tersusunnya RPTL Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Terdapatnya pelaksanaan dan pemantauan SDA dan LH yang berkelanjutan)</p>	<p>Jumlah penelapapan indikator daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ecoregion</p>	<p>Penetapan dan update (pemburuan) indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>	<p>Tersusunnya indeks daya dukung dan daya tampung LH Nasional</p>	<p>Jumlah penelapapan indikator daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ecoregion</p>	<p>Penetapan indikator DDDT lingkungan hidup nasional</p> <p>Pengembangan NSPK dan metode DDDT Lingkungan Hidup</p>	<p>1 penelapapan indikator DD DT Nasional</p>	100%
						<p>1 Draft Pedoman Penyusunan DDDTLH</p>	100%
<p>Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDRB Nasional (Terdapatnya dan terbankannya data dan informasinya sumberdaya alam dan lingkungan hidup )</p>	<p>Jumlah satuan peta ecoregion pada skala 1 : 250.000</p>	<p>Penyusunan/penyempurnaan n peta ecoregion pada skala 1 : 250.000</p>	<p>Tersedianya peta ecoregion pada skala 1 : 250.000</p>	<p>Satuan peta ecoregion pada skala 1 : 250.000</p>	<p>Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis DDDTLH daerah</p>	<p>2 Provinsi</p>	100%
						<p>9 Satuan Peta ecoregion dan ecoregion Bali, Nusa</p>	100%
<p>Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDRB Nasional (Terdapatnya dan terbankannya data dan informasinya sumberdaya alam dan lingkungan hidup )</p>	<p>Jumlah Prov/Kab/Kol yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau</p>	<p>Penyusunan neraca SDA LH, validasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau</p>	<p>Tersusunnya Neraca SDA LH, Validasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau</p>	<p>Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau</p>	<p>Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA LH Tematik</p>	<p>1 Dok Neraca SDA LH Kabupaten</p>	100%
						<p>1 Dok PDRB Hijau Kabupaten</p>	100%
<p>Good governance kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</p>					<p>Layanan perkantoran</p>	<p>12 Bulan</p>	100%
<p>Good governance kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</p>					<p>Pengadaan/pemeliharaan Fasilitas dan Fasilitas Perkantoran</p>	<p>100%</p>	100%





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
DIREKTORAT PENGECAHAN DAMPAK LINGKUNGAN  
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

PERATURAN DIREKTUR PENGECAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH  
DAN SEKTOR DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN

NOMOR : P. 02/POLKMS/TU/KEU/012/2017

TENTANG

RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGECAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2018

DIREKTUR PENGECAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN  
SEKTOR,

- Meningkat :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDI/KEU/011/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tentang Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenlHK-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);
11. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDI/KEU/011/2017 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017.

13. Peraturan...



**CAPAIAN SERAPAN  
ANGGARAN TAHUN 2016 DAN  
PROGNOSIS TAHUN 2017**

**1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016**

Pada Tahun anggaran 2016, anggaran Direktorat PDLKWS ditetapkan sebesar Rp 4,297,000,000 (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk membiayai 8 output dan 1 layanan Perkantoran. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, DIPA tersebut setidaknya mengalami 2 (dua) kali revisi besar, yaitu :

- a. Pemotongan/Penghematan anggaran APBN-P I pada bulan Agustus 2016 sebanyak Rp 744,160,000 atau sekitar 17,32%.
- b. Self-blocking Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan September atas instruksi Menteri Keuangan dalam mengantisipasi tidak tercapainya realisasi pendapatan negara (APBN-P II) sebanyak Rp 302,549,000 atau sekitar 8,52 % dari pagu APBN-P I sebesar Rp 3.552.840.000.

Berdasarkan hal tersebut, secara riil, anggaran DIPA tahun 2016 yang dapat dibelanjakan sebesar Rp 3,250,291,000 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Capaian serapan anggaran Tahun 2016 disajikan pada Tabel ... berikut.

**Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Serapan Anggaran (Rp)	% terhadap APBNP	% terhadap Self-Blocking
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DDDTLH	335.181.247	99,70	99,70
	Dokumen KLHS yang terreview kelayakannya	477.874.347	95,97	95,97
Tersusunnya RPPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan RPJMN dan RPJP	Jumlah RPPPLH Nasional berbasis DDDI yang telah disusun, diterapkan, dan menjadi acuan pemerintah	305.443.350	98,86	99,13
	Jumlah RPPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan, dan menjadi acuan pemerintah	180.897.100	98,79	99,36
Tersusunnya RPPPLH Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersusun, diterapkan, dan menjadi acuan pemerintah	Jumlah Penetapan Indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada 6 ekoregion	536.035.500	97,85	98,40
	Jumlah satuan Pefta ekoregion skala 1 : 250.000	286.485.272	63,60	95,00
Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRR Hijau daerah sebagai Input Neraca SDA LH dan PDR Hijau Nasional	Jumlah Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memiliki Neraca SDA LH dan PDRR Hijau	435.932.200	95,45	95,45
	Layanan Perkantoran	566.138.519	98,90	98,90
<b>Jumlah Serapan</b>		<b>3.170.677.113</b>	<b>89,24</b>	<b>97,55</b>

## 2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

Tabel 7. Perkiraan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2017

Komponen (unit) Kegiatan	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pengendalian dan Penjaminan kualitas KHS	Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KHS RTRLN	8.622.000	99,10
rencana tata ruang laut nasional	Validasi kelayakan KHS RTRLN	11.480.000	72,29
Pengendalian dan Penjaminan kualitas KHS	Bimbingan Teknis KHS RZWP	29.790.300	98,64
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	Validasi kelayakan KHS RZWP	112.569.401	99,16
Pengendalian kualitas KHS berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KHS per tahun	Penyusunan NSPK KHS	96.439.500	96,98
Review kelayakan KHS sebanyak minimal 100 KHS per tahun	Bimbingan Teknis KHS daerah	222.768.800	99,81
Penyusunan/penyempurnaan/Review RPPUH Nasional	Koordinasi Nasional KHS	94.390.000	98,95
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Validasi kelayakan KHS Sektor	92.040.165	99,76
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Validasi kelayakan KHS Provinsi	118.392.800	99,57
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Validasi kelayakan KHS Kendeng Utara	253.422.237	99,46
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Penyusunan NSPK RPPUH Nasional	88.515.500	99,89
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Midterm Review RPPUH Nasional	115.177.600	99,91
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	42.860.000	98,53
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Penyusunan NSPK RPPUH Provinsi	123.727.000	99,23
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPUH Provinsi	34.860.000	99,43
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Penyusunan NSPK RPPUH Kab/Kota	122.973.100	99,91
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPUH Kab/Kota	187.551.158	99,63
Penerapan dan update (pembaruan) Indikasi daya dukung dan dayaampung lingkungan hidup	Pengembangan NSPK dan metode DDDT Lingkungan Hidup	64.713.302	99,96
Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250000	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis DDDTLH daerah	42.020.000	100,00
Penyusunan rencana SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan Skoring Daya Dukung dan DayaTampung Lingkungan Hidup	38.366.388	100,00
Penyusunan rencana SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Pemetaan Ekoregion	168.189.180	99,88
Layanan Perkantoran	Sosialisasi dan Asistensi Penerapan Ekoregion	83.783.460	99,44
Layanan Internal	Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA LH Tematik	121.951.104	97,11
	Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB yang disesuaikan	121.951.104	97,11
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi penerapan Instrumen Ekonomi	66.781.800	96,91
	Lingkungan dengan Instansi Terkait	99.438.989	96,86
	Penyusunan Pedoman Valuasi Ekonomi	29.929.000	99,95
	Sosialisasi PP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan	552.927.489	99,77
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Direktorat PDLKWS	13.328.500	99,87
	Pemeliharaan / Perbaikan Peralatan Kantor	240.521.193	99,95
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor 4/2	485.866.000	99,90
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3.852.313.666	99,24
	Jumlah Prognosis Serapan		

- DIPA Direktorat PDLKWS Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 3.881.732.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terbagi ke dalam 9 Output Teknis, -1 Output Layanan Perkantoran, dan 1 Output Layanan Internal (Belanja Modal). Terdapat beberapa kejadian penting selama pelaksanaan DIPA 2017 yang menyebabkan terjadinya pengeseran-pengeseran belanja antar output, yaitu :
1. Perpindahan Kantor dari Kebon Nanas ke manggala Wambakti, menyebabkan penambahan pada Belanja modal secara signifikan untuk keperluan perbaikan/penyiapan ruangan.
  2. Fasilitasi KHS Kendeng Tahap II, kegiatan yang sebelumnya tidak ada dalam Renja maupun Renstra, yang sebagian besar anggarannya dibebankan pada DIPA Direktorat PDLKWS.
- Berdasarkan serapan sampai dengan November 2017 yang sudah mencapai 84%, periraan Serapan DIPA tahun 2017 sebagaimana Tabel berikut :

#### A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan RKP Tahun 2018, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ikut bertanggungjawab dalam pencapaian 2 (dua) Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Pedesaan dan Reforma Agraria. Program Prioritas Nasional tersebut menurunkan 2 (dua) Kegiatan Prioritas yaitu **Kegiatan Prioritas Pengelolaan SDA Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumberdaya Hutan dan Kegiatan Prioritas Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria**, yang keduanya tidak dikaitkan secara langsung dengan kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Tahun 2018.

Selanjutnya, mengacu kepada tujuan Rencana Kerja Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 yaitu **Memastikan Kawasan Hutan yang Mantap dan Lingkungan yang berkelanjutan Sebagai Prakondisi Pembangunan Nasional terutama untuk Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**, yang salah satu arah kebijakannya adalah **Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sector pembangunan**, maka Direktorat PDLKWS sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan, terutama yang terkait pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, tidak menimbulkan efek yang merugikan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang serta dapat menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

- Terkait dengan hal tersebut, maka dukungan Direktorat terhadap Program Planologi, KLHK, dan Prioritas Nasional adalah dengan menyiapkan perangkat *safeguarding* lingkungan hidup untuk membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi manfaat dan dampak pembangunan bagi warga negara. Untuk tujuan tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dilakukan, yaitu:
1. *Memperkuat alas hukum safeguarding lingkungan melalui percepatan penyelesaian aturan-aturan turunan dari UU 32/2009 untuk memberi kepastian dasar kerja sehingga dapat benar-benar dilaksanakan di lapangan.*
  2. *Memperkuat jejaring kerja dengan K/L, Pemda, dan Lembaga terkait lainnya dalam mendorong pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi ke masa depan.*
  3. *Meningkatkan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan yang tidak didasarkan atas kapasitas /DDDT lingkungan hidup dengan berperan aktif dalam penyelesaian isu-isu lingkungan skala nasional yang terjadi.*

## B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan Tahun 2018

Pada dasarnya, kegiatan tahun 2018 harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2017, keberlanjutan proses, serta kendala-kendala yang terjadi dan/atau potensial terjadi.

Secara umum melalui Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor diharapkan dapat memastikan terjaminnya kualitas KLHS yang berbasis daya dukung dan daya tampung serta telaksananya review kelayakan KLHS; tersusunnya RPP LH yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan nasional maupun daerah (provinsi/kota/kabupaten); tersusunnya Neraca SDA-LH, Valuasi Ekonomi SDA-LH dan PDRB Hijau; Ditetapkannya indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Tersedianya peta ekoregion pada skala 1:250.000 serta terselenggaranya kegiatan perkantoran secara lancar dalam 1 tahun.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018, Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang dibagi ke dalam 9 (sembilan) target indikator/output kegiatan serta 1 (satu) Sasaran Kegiatan pendukung, sebagaimana pada Tabel ... disamping.

Selain kegiatan di atas, dalam rangka upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan, maka dilakukan kegiatan-kegiatan dengan target-target/output secara strategis mendukung (prkondisi) tercapainya output kegiatan dan dalam kategori yang lebih luas dapat mendorong bekerjanya sistem pencegahan dampak lingkungan secara nasional, baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan-kegiatan pendukung tersebut dapat dijabarkan pada Tabel ...

Tabel 8. Indikator dan Target Kegiatan Pencegahan dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Telaksananya Lingkungan bagi rencana zona pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5 KLHS R2WP3K
Telaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RKP, RPKM dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	10 KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung 15 KLHS yang terreview kelayakannya
Tersusunnya RPP LH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (terlaksananya pelestarian dan pemantapan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPP LH Nasional yang tersusun (1 RPP LH Nasional), Jumlah Review RPP LH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPP LH Nasional), 1 Dokumen rewu 5 Tahunan)	1 Dokumen Arahon Implementasi RPP LH Ekoregion Sulawesi 10 RPP LH Kab/Kota di Ekoregion Kalimantan 1 Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung LH Nasional (Penuharian data daya dukung dan daya tampung nasional)
Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai Input Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional (Tersedia dan terbantuannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen
Terselenggaranya kegiatan Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor yang efektif dan efisien	Layanan perkantoran	12 Bulan

Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan Indikator Pendukung Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Pendukung Tahun 2018	Target Pendukung Tahun 2018
Tertindakannya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RRP, RPJMN dan KR P Prioritas	Meningkatnya kapasitas penyusunan KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dan penyusunan KLHS RPJMD dan KLHS RTRW	1 Laporan
	Tersedianya Model KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil	1 KLHS
	Tersedianya Sistem Informasi KLHS	1 Kegiatan
	Diterapkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tentang KLHS	1 Laporan
	Terjalinya kerjasama dan kesepakatan para pihak penyusunan KLHS Pusat dan Daerah	1 Kegiatan
	Tersedianya Hasil Identifikasi KR yang berdampak pada kerusakan lingkungan	1 KRP Nasional
	Tersedianya PP RPPUH Nasional	1 PP/Draft PP
	Tersaji disiasikannya arahan RPPUH Nasional oleh sektor dan daerah	1 Laporan
	Tersedianya Permen RPPUH Daerah	1 Permen
	Diterapkannya konsep DDDTLH dalam perencanaan di daerah	1 Laporan Binftek
Tersusunnya RPRH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelaksanaan dan pemantauan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Diterapkannya konsep Ekoregion dalam perencanaan di daerah	1 Laporan Binftek
	Meningkatnya akurasi Peta Ekoregion	Update Saluran Peta Ekoregion Bali - Nusa
	Tersosialisasikannya PP 46/2017	1 Laporan
	Terjalinya kerjasama Tersedianya NSPK/Permen Turunan PP 46/2017	1 Permen LHK
Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRE Hijau daerah sebagai Input Neraca SDA LH dan PD8 Hijau Nasional (Tersedia dan tebarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Penerapan PP Instrumen Ekonomi LH	1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi

Berdasarkan target - target tersebut, kemudian disusun rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, mulai dari tingkat Kegiatan sampai dengan tingkat Elemen Kegiatan, yang menggambarkan struktur kegiatan secara utuh yang nantinya akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam penganggaran melalui RKA-K/L Tahun 2018.

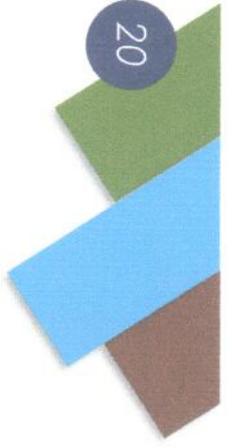
Tabel 10. Struktur Kegiatan Tahun 2018

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
<p><b>Pencegahan Dampak Lingkungan Wilayah Kabijaksanaan dan Sektor</b></p>	<p>Tertaksananya lingkungan bagi rencana zona pesisir</p> <p>Tertaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RRJP, RPJMN dan KRP Prioritas</p>	<p>Pengendalian dan Penjaminan Kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir</p>	<p>Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KLHS RZWP3K</p>
		<p>Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun</p>	<p>Penyusunan NSPK KLHS</p> <p>Bimbingan Teknis KLHS daerah</p> <p>Koordinasi Nasional KLHS</p>
		<p>Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun</p>	<p>Validasi kelayakan KLHS Sektor</p> <p>Validasi kelayakan KLHS Provinsi</p>
		<p>Penyusunan/penyempurnaan RPPPLH Nasional</p>	<p>Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelalaan Lingkungan Hidup Nasional</p> <p>Fasilitasi, Bimbingan, dan Asistensi Teknis Urusan RPPPLH Nasional</p>
		<p>Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPPLH Provinsi</p>	<p>Asistensi Teknis Penyusunan RPPPLH Provinsi</p> <p>Penyusunan NSPK RPPPLH Provinsi</p>
		<p>Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPPLH kab/kota</p>	<p>Bimbingan Teknis Penyusunan RPPPLH Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan NSPK RPPPLH Kabupaten/Kota</p>
		<p>Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>	<p>Penetapan dan Update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</p> <p>Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah</p>
		<p>Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1:250000</p>	<p>Penerapan instrumen DDDTLH di daerah melalui Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah</p>
			<p>Pemetaan Ekoregion</p> <p>Asistensi Penerapan Peta Ekoregion</p>

Tabel 10. Struktur Kegiatan Tahun 2018

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Penyusunan neraca SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau  Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA-LH Tematik Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait Penguatan Instrumen Ekonomi Lingkungan Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Dua/Empat

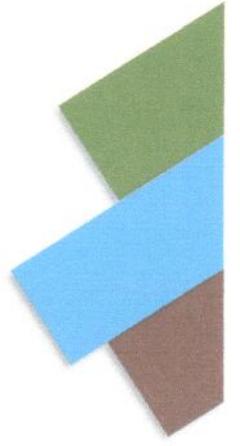
Pada tahun 2018, target kinerja utama kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor lebih kecil dari sasaran kegiatan sebagaimana telah disusun dalam rencana strategi tahun 2015-2019, yang disebabkan oleh alokasi anggaran tahun 2018 yang belum sesuai dengan rencana alokasi anggaran dalam Renstra. Pagu Anggaran untuk Kegiatan pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (400199) Tahun 2018 ditetapkan sebesar **Rp. 3.808.166.000,-** (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) atau berkurang sebesar Rp 735,660,000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari DIPA Tahun 2017.



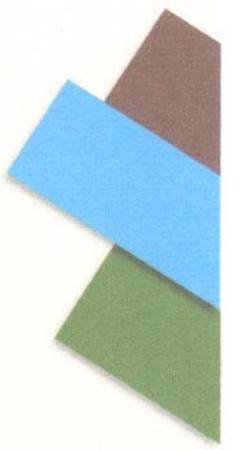
Rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Tahun 2018 dipergunakan sebagai acuan utama oleh seluruh Subdirektorat (unit eselon III) lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) Tahun 2018, dimana seluruh output kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2018 harus berdasarkan pada output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan dalam rencana kerja ini.

Harapannya adalah seluruh kegiatan yang direncanakan ketika dituangkan ke dalam DIPA Tahun 2018 akan lebih terarah pengalokasiannya dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional, secara spesifik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan program planologi kehutanan dan tata lingkungan melalui penyediaan instrumen dan regulasi guna percepatan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

Implementasi dari penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA)/ DIPA Tahun 2018 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018.



# LAMPIRAN



**Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2018**  
**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**

No.	Unit Kegiatan/Bemen Kegiatan/ Indikator Elemen Kegiatan	Sasaran	Target	Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi
1	<b>Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS rencana zonasi wilayah pesisir</b> Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KLHS RZWP3K Jumlah KLHS RZWP3K yang terjamin kualitasnya	Tertatasannya lingkungan bagi rencana zona pesisir	5	KLHS RZWP3K	260.000.000	Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera (Disesuaikan dengan kebutuhan)
2	<b>Pengendalian kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung sebanyak minimal 100 KLHS per tahun</b> Fasilitasi Dan Bimbingan Teknis KLHS Sektor Jumlah KLHS Sektor yang terjamin kualitasnya Fasilitasi Dan Bimbingan Teknis KLHS Daerah Jumlah KLHS Daerah yang terjamin kualitasnya	Tertatasannya analisis lingkungan bagi semua RTFW, RRP, RPJMN dan KRP Prioritas	10	KLHS	421.900.000	Provinsi/kabupaten/kota di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera (Disesuaikan dengan kebutuhan)
			5	KLHS	232.960.000	
			5	KLHS	188.940.000	
			10	KLHS	337.900.000	
			5	KLHS	149.450.000	
3	<b>Review Kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun</b> Validasi Kelayakan Sektor Jumlah KLHS Sektor yang terreview Kelayakannya Validasi Kelayakan KLHS Provinsi Jumlah KLHS Daerah yang terreview Kelayakannya		5	KLHS	188.450.000	Provinsi: Kepulauan Riau, Nangra Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku, Jawa Barat, Jawa Timur, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Jambi
			1	Dokumen	200.100.000	
			1	PP/RPP	68.220.000	
			1	Dokumen	77.160.000	
			1	Laporan	54.720.000	
4	<b>Penyusunan/penyempurnaan RPPUH Nasional</b> Penetapan Rencana Pelelingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional Jumlah Dokumen RPPUH Nasional yang Tersusun Penyusunan Arah Implementasi RPPUH Nasional Jumlah Dokumen RPPUH Nasional yang Tersusun Fasilitasi, Bimbingan, dan Asistensi Teknis Urusan RPPUH Nasional Jumlah Provinsi yang menerapkan RPPUH sebagai acuan RPPUH Provinsi	Tersusunnya RPPUH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelaksanaan dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	1	Dokumen	68.220.000	Jakarta
			1	Dokumen	77.160.000	Jawa Barat
			1	Laporan	54.720.000	Jawa Barat
			5	Provinsi	115.632.000	Ekoregion Sulawesi (Sulut, Gorontalo, Sulteng, sultra, sulsel)
			1	Permen/Rapermen	27.368.000	
5	<b>Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPUH kab/kota</b> Asistensi Teknis Penyusunan RPPUH Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi/BinTeK/Asistensi RPPUH Provinsi Penyusunan NSPK RPPUH Provinsi Jumlah NSPK RPPUH Provinsi yang Tersusun		10	Kabupaten/Kota	152.100.000	Ekoregion Kalimantan (Pontianak, Kutubraya, Banjarmasin, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Balikpapan, Samarinda, Tarakan)
			10	Kabupaten/Kota	126.051.000	
			1	Pedoman/Draft	26.049.000	
6	<b>Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPUH kab/kota</b> Bimbingan, Teknis Penyusunan RPPUH Kabupaten/Kota pada Ekoregion Kalimantan Jumlah Dokumen tertulis Hasil Fasilitasi/BinTeK/Asistensi RPPUH Kabupaten/Kota Penyusunan NSPK RPPUH Kabupaten/Kota Jumlah NSPK RPPUH Kabupaten/Kota yang tersusun					

**Matik Rencana dan Kegiatan Tahun 2018**  
**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**

No.	Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan/ Indikator Elemen Kegiatan	Sasaran	Target	Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi
7	<b>Penetapan dan update (pembaruan) indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</b> Penetapan dan Update (pembaruan) indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Jumlah Penetapan Indikator Daya Dukung Nasional Monitoring dan Evaluasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jumlah laporan Hasil Monitoring Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah Jumlah Pedoman DDDTLH yang disusun Penerapan instrumen DDDTLH di daerah melalui Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah Jumlah Provinsi yang mengacu Pedoman KLHK dalam penetapan DDDTLH Daerah	Tersusunnya RPPUH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelaksanaan dan pemantapan SDA dan LH yang berkelanjutan)	1	<b>Indeks</b>	<b>495.000.000</b>	
			1	Penetapan	158.570.000	Jakarta
			1	Laporan	94.480.000	PPE
			1	Dokumen	111.750.000	Jakarta dan PPE
			2	Provinsi	130.200.000	Ecoregion Bali dan Nusa
8	<b>Penyusunan/pembaruan peta ecoregion pada skala 1:250000</b> Pemetaan Ecoregion Satuan Peta Ecoregion Skala 1 : 250.000 Asistensi Penerapan Peta Ecoregion Jumlah Provinsi yang menerapkan Ecoregion	Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya dalam dan lingkungan hidup)	9	<b>Satuan Peta</b>	<b>495.000.000</b>	Ecoregion Papua dan Maluku
			13	Provinsi	236.000.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI. Yogyakarta, Jatim, Riau, Lampung, Kalim, Sulsel, Sulut, Bali dan NTB
			1	Dokumen	80.460.000	Kabupaten Pasaman
			1	Laporan	118.660.000	Jakarta
9	<b>Penyusunan neraca SDA LH, valiasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau</b> Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA-LH Tematik Jumlah Provinsi/Kabupaten/kota yang memiliki Neraca SDA LH Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan Jumlah Provinsi/Kabupaten/kota yang memiliki PDRB Hijau Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan instansi terkait tentang instrumen Ekonomi Lingkungan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Pengembangan NSRF dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Perangkat Ekonomi Lingkungan yang tersedia Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor yang efektif dan efisien	2	<b>Dokumen</b>	<b>495.000.000</b>	
			1	Dokumen	80.460.000	Kabupaten Pasaman
			1	Dokumen	80.460.000	Kabupaten Pasaman
			1	Laporan	118.660.000	Jakarta
			1	Laporan	116.500.000	Jakarta
10	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b> Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Ferkanloran Kegiatan perkantoran berjalan baik Pemeliharaan/Perbaikan Fasilitas dan Mesin Lainnya Kegiatan perkantoran berjalan baik Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Dua/Empat Kegiatan perkantoran berjalan baik	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor yang efektif dan efisien	12	<b>Bulan</b>	<b>808.166.000</b>	
			12	Bulan	601.840.000	Jakarta
			12	Bulan	31.826.000	Jakarta
			12	Bulan	174.500.000	Jakarta